

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NO 02 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Wanda Febri Yusdianatari, Sri Wilujeng, Safrieta Jatu Permatasari

BUMDES Desa Rejosari

e-mail: wandafebriyusdianatari@gmail.com

**Abstract:** *The high poverty rate in Rejosari Village, where many people lack the skills to develop micro-enterprises. The research objective aims to evaluate the effectiveness of the micro-enterprise skills training program in improving community welfare. The research methodology uses a qualitative approach with purposive sampling and snowball sampling techniques to determine informants. Data collection was carried out through interviews, observations, and documentation. The research results show that the skills training program has been running well, but there are still obstacles in terms of understanding and community participation. The discussion reveals that effective communication between the village government and the community is crucial for increasing participation in the program. Adequate human resources and facilities also play a role in the successful implementation of policies. The conclusion of this study emphasizes that although there has been progress in the implementation of the program, further efforts are still needed to raise public awareness and ensure the sustainability of the training program.*

**Keywords:** *Poverty Alleviation, Micro-Enterprise Training, Policy Implementation*

**Absrak:** Tingginya angka kemiskinan di Desa Rejosari, di mana banyak masyarakat yang kurang terampil dalam mengembangkan usaha mikro. Poin tujuan penelitian bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan keterampilan usaha mikro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling untuk menentukan informan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan keterampilan telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala dalam hal pemahaman dan partisipasi masyarakat. Pembahasan mengungkapkan bahwa komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dalam program. Sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai juga berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pelaksanaan program, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan keberlanjutan program pelatihan.

**Kata Kunci :** Penanggulangan Kemiskinan, Pelatihan Usaha Mikro, Implementasi Kebijakan

[Jurnal Katarsis](#) is licensed under [CC BY-SA 4.0](#)



### Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Kemiskinan, sebuah masalah klasik yang memiliki kompleksitas tinggi, dialami oleh hampir semua Negara di dunia. Negara makmur dan kaya sekalipun, akan berurusan dengan masalah tersebut. Kemiskinan selalu diiringi dengan ketimpangan, ketidakmerataan, ketidak keadilan sosial beserta permasalahan sosial lanjutan sebagai relasi maupun produk lanjutan dari kemiskinan tidak terkecuali Indonesia. Selain itu Penanggulangan kemiskinan adalah seperangkat tindakan, baik ekonomi

maupun kemanusiaan, yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen.. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Problema kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah Indonesia sebagai sebuah negara. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan terutama dapat diwujudkan dengan mengusahakan agar semakin banyak

kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Jumlah orang miskin tidak sepenuhnya berkurang, bahkan kemiskinan dapat di gambarkan telah bertransformasi menjadi salah satu permasalahan yang ada di Indonesia.

Penanggulangan Kemiskinan memerlukan keterpaduan antar kebijakan program yang tersebar di berbagai sektor. Kebijakan maupun Program yang dilaksanakan harus berpihak dan memberdayakan masyarakat sehingga tidak menempatkan masyarakat miskin semata-mata sebagai obyek dari pembangunan. Dengan demikian maka upaya penanggulangan kemiskinan, perlu lebih melibatkan masyarakat miskin sebagai subyek pembangunan sehingga di harapkan masyarakatmiskin akan berdaya dan mampu melaksanakan sendiri program pembangunan yang ditujukan kepada mereka

Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan kemiskinan sendiri merupakan salah satu tugas pemerintah daerah yang harus dijalankan sesuai amanah peraturan perundangan, Penanggulangan kemiskinan seperti pemberdayaan masyarakat mencakup lima bidang yang sangat luas yaitu bidang ekonomi, pertanian dan perkebunan, kesehatan, pendidikan, dan agama. Salah satu yang peneliti ambil dari penelitian ini yaitu dibidang ekonomi yang melalui program pelatihan keterampilan guna memberikan hasil dan membantu masyarakat tentang bagaimana melakukan kreatifitas, inovasi agar dapat membuah hasil dan membantu perekonomian dalam keluarga sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

Salah satu desa yang dilakukan penelitian yaitu Desa Rejosari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Potensi Sumber daya manusia Desa Rejosari memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.072 orang dengan laki-laki sebanyak 1.547 Orang dan perempuan sebanyak 1.525 Orang Dengan Total Keseluruhan 1,412 Kepala Keluarga. Perkembangan penduduk yang ada di Desa Rejosari tahun ini sebesar 23,02% dibandingkan dengan tahun lalu dengan jumlah KK 2019 sebanyak 1.157 KK dan Tahun ini Sebanyak 1412 KK

Kondisi pembangunan dalam bidang ekonomi masyarakat Desa Rejosari yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, sudah mampu mengelola pertaniannya dengan baik, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa di Desa Rejosari masih banyak masyarakat dibawah garis kemiskinan, yaitu sekitar 706 jiwa dari total 2638 jiwa penduduk Desa Rejosari atau 30% dari jumlah penduduk Desa Rejosari. Namun demikian, Desa Rejosari juga terus berusaha semaksimal mungkin untuk lebih giat dan selalu membangun desa ini sseperti salah satunya melakukan Pelatihan Keterampilan guna membangun kreatifitas yang ada di desa tersebut sehingga mampu mensejajarkan diri dengan Desa atau Kelurahan lain di Kecamatan Glagah. Kondisi nyata di desa tersebut yang menunjukkan tingginya angka kemiskinan yaitu dari tingkat penghasilan masih dibawah UMR sekitar kurang dari 1 juta per bulan nya, kondisi rumah sebagian warga disana masih ada yang menggunakan bilik bambu. Di desa Rejosari juga ada tempat usaha yang tidak mengutamakan warga sekitar sebagai pegawai

Berdasarkan informasi tersebut, ditemukan permasalahan yaitu masih sebagian masyarakat yang mengalami kemiskinan dan kurang terampil dalam melakukan kreatifitas untuk usaha mikro. Kemiskinan tersebut mengakibatkan munculnya Implementasi Penanggulangan Kemiskinan. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Peraturan Daerah Banyuwangi nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Banyuwangi. Dimana salah satu pasalnya yaitu pasal 16 c dan d yang berisikan seperti Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil dan Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Dari permasalahan yang ditemukan, bagian yang menarik untuk diteliti yaitu

tentang penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dibidang Ekonomi yang salah satunya yaitu program Pelatihan Keterampilan Usaha Mikro dimana penelitian ini bertitik fokus pada strategi pelatihan usaha mikro untuk menangani kemiskinan di Desa Rejosari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Dari sudut pandang perspektif peneliti mengamati sangat memungkinkan masalah itu secara teknis untuk diteliti, dikarenakan tingkat kemiskinan sebagian disana masyarakatnya kurang mampu dan tidak memiliki pekerjaan. Salah satu kendala dalam Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro tersebut adalah kurang terampil dalam mengembangkan Usaha mikro sehingga Program Pelatihan Keterampilan merupakan salah satu upaya penting dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Rejosari Kecamatan Glagah tersebut. Adapun jenis pelatihannya seperti: Membatik, Menyablon, Desain Grafis, Melukis kaca, dan Pengolahan sampah Kreatif.

Program Pelatihan Usaha Mikro ini memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Melalui program pemberdayaan upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya sebatas memberikan bantuan langsung kepada penduduk miskin. Karakteristiknya adalah bantuan modal skala mikro, penguatan kemandirian dan akses pasar, dan peningkatan keterampilan serta manajemen usaha. Penerima manfaatnya adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil, dan juga dapat ditujukan pada masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Faktor pendorong yang mempengaruhi program ini yaitu sosialisasi, partisipasi masyarakat, program pemerintah yang harus dilaksanakan, Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satu hambatan dalam Penanggulangan masyarakat miskin adalah tidak adanya modal, tidak dilaksanakan secara periodik, tidak berkelanjutan, dan peran pendamping masih lemah, drenan begitu perlunya

memaksimalkan monitoring dan evaluasi dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

## Tinjauan Pustaka

### 1. Konsep Kebijakan Publik

Keberhasilan program dapat dikaji dari dua prespektif yang berbeda, yaitu dari sudut proses (implementasi) dan hasil (outcomes). Prsepektif yang pertama menekankan pada konsistensi antara pelaksanaan program dan kebijakan dengan policy guidelines. Menurut prespektif ini, suatu program pemerintah dikatakan berhasil kalau pelaksanaan program itu sesuai dengan policy guidelines yang telah ditentukan. Dari tinjauan outcomes, suatu program dapat dinilai berhasil kalau program itu menghasilkan dampak seperti yang diinginkan.

Fredrich dalam Agustino (2017: 166) mengemukakan bahwa Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

### 2. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan sebuah bentuk pelaksanaan serta penerapan. Dari segi bahasa, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan. Menurut Hill and Hupe (dalam Handoyo, 2012:93) mengartikan bahwa, "Implementasi sendiri berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat.

Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang diuga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara

langsung maupun tidak langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya (Wahyudi, 2016).

### 3. Konsep Kendala dalam Implementasi Kebijakan Publik

Kendala merupakan sinonim dari halangan atau rintangan yang membatasi, menghalangi, dan mencegah pencapaian sasaran, memaksa pembatalan pelaksanaan. Mengimplementasikan sebuah kebijakan bukanlah masalah yang mudah, terutama dalam mencapai tujuan bersama. Cukup susah untuk membuat sebuah kebijakan public yang baik dan adil. Dan lebih susah lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk dan cara memuaskan. Masalah lainnya adalah kesulitan dalam memenuhi tuntutan berbagai kelompok yang dapat menyebabkan konflik yang mendorong berkembangnya pemikiran politik sebagai konflik. Oleh karena itu suatu kendala akan berimplikasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan publik.

Friedrich (dalam Agustino, 2012:7) menguraikan Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, Dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2019:99) adalah sebagai berikut: “Ada 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni sebagai berikut:

- a. Standard dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- b. Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu didukung dengan sumber daya, baik sumber daya manusia (*non-human resource*).
- c. Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan

koordinasi dengan instansi lain.

- d. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud dengan karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu memengaruhi implementasi suatu program.
- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan
- f. Disposisi implementor. Hal ini mencakup 3 (tiga) hal yang penting, yakni: (1) respon implementor terhadap kebijakan, (2) yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, dan (3) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Kendala yang terjadi dalam proses pengimplementasian kebijakan sangat beragam. Ketidaktepatan dalam berkomunikasi menjadi faktor yang penting, ketidaktepatan dalam penyampaian akan menimbulkan pemahaman ganda dan berbeda sehingga terjadi miskomunikasi. Perbedaan pendapat yang disampaikan hingga bentrok antara petugas dengan masyarakat pun sering terjadi, hal ini harus dihindari dengan penyampaian tutur kata yang baik, tidak emosional dan memahami apa yang dirasakan oleh masyarakat.

### 4. Konsep Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis dan terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin kota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar statistik tapi juga menyangkut masalah kemanusiaan.

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2004) mengartikan bahwa, Penanggulangan kemiskinan di era otonomi daerah mengandung pelajaran tentang peluang

penanggulangan kemiskinan, baik dari bentuk lama yang disusun di pemerintah pusat, maupun pola baru hasil susunan pemerintah daerah, mungkin disertai dukungan pemerintah pusat atau swasta di daerah.

Peraturan Presiden pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

### 5. Konsep Keterampilan

Keterampilan dapat menunjukkan pada aksi khusus yang ditampilkan atau pada sifat dimana keterampilan itu dilaksanakan. Banyak kegiatan dianggap sebagai suatu keterampilan, terdiri dari beberapa keterampilan dan derajat penguasaan yang dicapai oleh seseorang menggambarkan tingkat keterampilannya. Hal ini terjadi karena kebiasaan yang sudah diterima umum untuk menyatakan bahwa satu atau beberapa pola gerak atau perilaku yang diperluas bisa disebut keterampilan (Fauzi, 2010: 7).

Menurut Sri Widiastuti (2010: 49) mengartikan bahwa, Istilah terampil biasanya digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan seseorang yang bervariasi. Keterampilan (skill) merupakan kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat.

### 6. Konsep Usaha

Menurut besar Kamus Besar Bahasa Indonesia, Usaha adalah kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; perbuatan, pekerjaan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu.

Menurut Muhadjir Effendy (2016) mengartikan bahwa, "Usaha merupakan kegiatan di bidang perdagangan dengan mencari untung.

### 7. Konsep Usaha Mikro

Menurut Rudjito (2013) Mengemukakan bahwa pengertian Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.

### 8. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 02 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Notohamidjojo (dalam syam, 2016) merumuskan tentang tujuan hukum sebagai berikut, Melindungi hal dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat, (dalam arti luas yang mencakup lembaga-lembaga sosial dibidang politik, sosial, ekonomi dari kebudayaan), atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum.

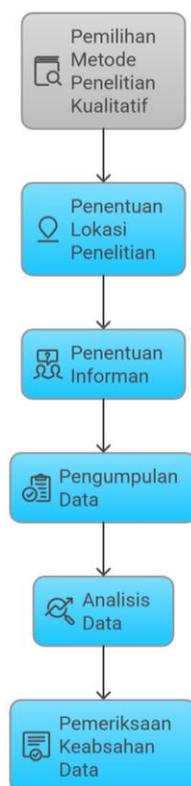
Dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan daerah tersebut perlu beberapa upaya yang dilakukan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Edwards III. Hal ini menjadi upaya wajib yang harus dilakukan guna terciptanya kondisi dan situasi yang kondusif, sehingga aktifitas yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi dapat terkendali dengan baik.

Kemiskinan tersebut mengakibatkan munculnya Implementasi Penanggulangan Kemiskinan. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Peraturan Daerah Banyuwangi nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Banyuwangi. Dimana salah satu pasalnya yaitu pasal 16 c dan d berisikan seperti Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil dan Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

### Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode penelitian kualitatif. Pendekatan Kualitatif dipilih oleh peneliti karena lebih tepat untuk memahami suatu fenomena yang sedang terjadi. Menurut Yusuf (2015) mengatakan bahwa, “pada prinsipnya pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan secara kritis suatu fenomena atau interaksi sosial dalam masyarakat untuk memahami maknanya secara alami



Gambar 1. Proses Penelitian Kualitatif

Lokasi penelitian di Desa Rejosari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Teknik yang digunakan dalam menentukan informan adalah menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data mengadopsi teknik Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33), yang menjelaskan bahwa dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan. Aktifitas dalam analisis data yaitu: *Data Condensation*, *Data Display* dan *Conclusion*

*Drawing/Verifications*, dimana analisis tersebut melalui 3 tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun dalam pemeriksaan keabsahan data menurut Moleong (2017:324) menjelaskan bahwa, dalam pelaksanaan pemeriksaan keabsahan data, terdapat 4 (empat) kriteria yang digunakan, yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan Studi Literatur yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Desa Rejosari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi tersebut bahwa pengimplementasian pemerintah desa dalam Penanggulangan Kemiskinan dengan menyelenggarakan program pelatihan keterampilan usaha mikro tersebut berdasarkan teori Edward III yang meliputi beberapa variabel yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi Implementor dan Struktur Birokrasi. Dengan adanya teori yang dipakai oleh peneliti untuk mengetahui apakah Implementasi tersebut sudah berjalan maksimal, berikut penjelasannya:

### 1. Implementasi Penanggulangan Kemiskinan dalam hal Komunikasi

Berdasarkan temuan hasil penelitian diatas dalam penyampaian kebijakan program pemberdayaan masyarakat yang sudah tercantum dalam mikro dapat berjalan lancar. Selain itu juga sarana dan prasaran yang digunakan untuk proram pelatihan tersebut sudah cukup lengkap.

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Rejosari sudah cukup baik dalam hal sumber daya seperti masyarakat, staff pemerintah Desa, dan juga sarana dan prasarana. Maka dari itu di Desa Rejosari tersebut suatu kebijakan bisa berjalan dengan baik.

### 2. Implementasi Penanggulangan Kemiskinan dalam hal Sumberdaya

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sumberdaya di Desa Rejosari sudah dikatakan cukup baik. Sumberdaya merupakan hal paling penting untuk menunjang terwujudnya keberhasilan suatu kebijakan. Pemerintah Desa

Rejosari dalam hal sumberdaya sudah cukup baik dikarenakan memiliki staff yang dapat diandalkan dan juga memiliki staff yang memadai maka keberhasilan staff dalam melaksanakan tugas dari program tersebut dan dengan adanya masyarakat peserta pelatihan usaha mikro dapat berjalan lancar. Selain itu juga sarana dan prasaran yang digunakan untuk proram pelatihan tersebut sudah cukup lengkap.

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Rejosari sudah cukup baik dalam hal sumber daya seperti masyarakat, staff pemerintah Desa, dan juga sarana dan prasarana. Maka dari itu di Desa Rejosari tersebut suatu kebijakan bisa berjalan dengan baik.

### 3. Implementasi Penanggulangan Kemiskinan dalam hal Disposisi

Dalam hal Disposisi Pemerintah Desa Rejosari dalam menalakan penegakan kebijaka Perda sudah cukup baik, Pemerintah Desa Rejosari dalam menyampaikan Perda penanggulangan kemiskinan tersebut sudah sesuai dengan apa yang ada di peraturan tersebut. Seperti halnya sikap para Implementor atau staff Desa terbilang ramah terhadap masyarakat dalam penyuluhan, pelayanan dan pelatihan terhadap pengimplementasian Perda Penanggulangan Kemiskinan

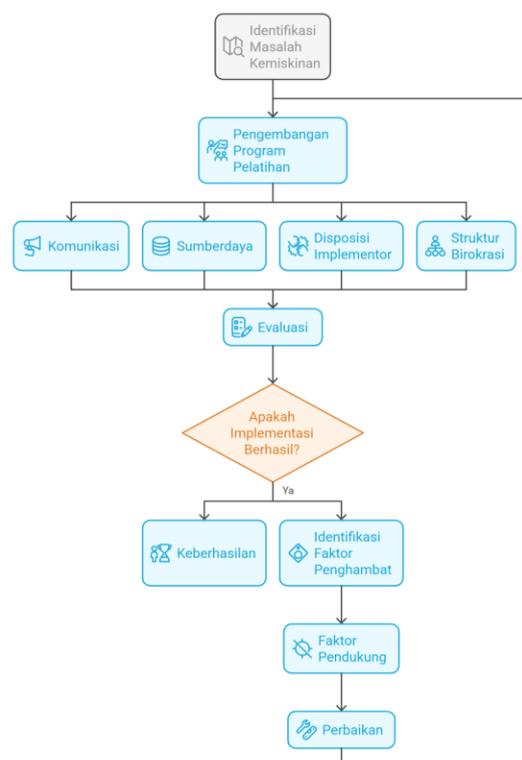
Dari semua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap para pelaku kebijakan pada saat memberikan sosialisasi, pelatihan keterampilan tersebut sangatlah baik, sehingga dapat menciptakan kepuasan kepada masyarakat.

### 4. Implementasi Penanggulangan Kemiskinan dalam hal Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa Rejosari sudah sesuai SOP, yang dimana dalam melakukan tugasnya yaitu pengimplementasian, Pemerintah Desa Rejosari terkait Perda Banyuwangi no 2 th 2020 tentang penanggulangan

kemiskinan adalah wewenang dari Pemerintah Desa Rejosari juga.

Dapat disimpulkan bahwa fungsi masing-masing unit organisasi jika dijalankan sesuai tupoksinya, suatu kebijakan akan berjalan dengan baik bila semua elemen yang ada didalamnya dapat bekerja sesuai dengan keahlian dan tanggung jawab masing-masing dibidangnya serta saling berkoordinasi satu sama lain. Jika hal tersebut tidak berjalan maka suatu kebijakan tidak akan terlaksana.



Gambar 2. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

### 5. Faktor-faktor dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 02 tahun 2020

Dalam hal menganalisis Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi khususnya Desa Rejosari, dalam hal ini dapat di pahami bahwa fenomena dilapangan terdapat kendala dalam mengimplementasikan Kebijakan, sebagai berikut:

- a. Faktor Penghambat : Segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. Dalam suatu implementasi kebijakan pasti terdapat faktor penghambat untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dalam hal ini Faktor Penghambat dalam Implementasi kebijakan di Desa Rejosari. bahwasanya faktor penghambat dari implementasi perda tersebut yaitu para staff kantor desa tersebut masih belum paham dalam melakukan tupoksinya. Hal tersebut yang menghambat masyarakat desa Rejosari dalam akses menuju masyarakat yang sejahtera.
- b. Faktor Pendukung : Faktor yang memfasilitasi perilaku individu atau kelompok termasuk keterampilan. Faktor ini meliputi ketersediaan, keterjangkauan sumber daya, prioritas dan komitmen masyarakat dan pemerintah dan tindakan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan. bahwasanya faktor pendukung dari implementasi Perda

tersebut yaitu dari segi fasilitas memadai yang dapat membantu berjalannya program-program yang di implementasikan.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berjalan dengan baik dan ada faktor yang masih memerlukan perbaikan, hal-hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi antar komunikator berjalan cukup baik walaupun ada yang masih belum tersampaikan secara jelas.
2. Sumberdaya, dalam hal ini sudah memadai dan juga sudah cukup baik dalam hal sumber daya seperti masyarakat, staff pemerintah Desa, dan juga sarana dan prasarana.
3. Disposisi Implementor, staff sebagai pemberi penyuluhan sosialisasi maupun pelatihan juga sudah mempunyai sifat baik, jujur, bertanggung jawab dan amanah.
4. Struktur Birokrasi, Pemerintah Desa Rejosari memiliki fungsi masing-masing unit organisasi yang dijalankan sesuai tupoksinya.

---

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur Buku:

- Agustino, Leo. 2014. **Dasar-dasar Kebijakan Publik**, Bandung CV. Alfabeta.
- Andi Prastowo. (2011). **Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian**, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Buku Panduan. 2018. **Profil Desa Rejosari**, Banyuwangi: Mahakarya.
- Buku Panduan. 2020. **Profil Desa Rejosari**, Banyuwangi: Mahakarya.
- Fredrich, Leo Agustino. 2017. **Dasar-Dasar Kebijakan Publik**, Bandung CV:Alfabeta.
- Haughton, Jonathan dan Shahidur R. Khanker, 2012. **Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan (Handbook on Poverty and Inequality)**, Jakarta: Salemba Empat.
- Handoyo Eko, Hill Michael and Peter Hupe. 2012. **Kebijakan Publik**, Semarang: CV.Widya Karya.
- Moleong, Lexy J. 2017. **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasalong, Kerlinger. 2017. **Teori Administrasi Publik**, Bandung: CV. Alfabet.
- Pasalong, Singarimbun dan Effendi. 2017. **Teori Administrasi Publik**. Bandung: CV. Alfabet.
- Subarsono, 2013. **Analisis Kebijakan Publik**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2017. **Metode Penelitian Kualitatif**, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sunarti, Euis 2012. **Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga; isu strategis dalam analisis dampak kependudukan terhadap aspek social ekonomi**, Bogor: Fakultas Ekologi Manusia IPB
- Wahab, Abdul Solichin, Grindel, Merilees. 2011. **Analisis dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**, Jakarta: Rineka Cipta..
- Wahyudi, A. Edward III, Gorge C. 2016. **Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan**

masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* , 2(2), 101-105. Retrieved from: <http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/566/851>

Winarno, Charles O. Jones. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Media Pressindo

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020, *Tentang Penanggulangan Kemiskinan*.  
Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 *Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*.  
Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008, *Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.

**Jurnal dan Artikel:**

Florita, Aina. 2018. *Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Oleh Dinas Koprasi dan UMKM Kota Padang*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik.

Prasetyo, Eko. 2008. *Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran*. Universitas Negeri Malang. Dosen Fakultas Ekonomi.

**Internet:**

Muhadjir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016. <http://digilib.uinsgd.ac.id> (diakses 21 November 2021).

Ahmad. *Pengertian Kemiskinan: Jenis, Penyebab dan Dampaknya*. <https://www.gramedia.com/literasi/kemiskinan/> (diakses 6 Desember 2021).

OnlinePajak. *Usaha Mikro: Klasifikasi, Dasar Hukum, dan Kewajiban Perpajakannya*, 2018. <https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/usaha-mikro> (diakses 9 Desember).